

PARTISIPASI KELOMPOK TANI DALAM PENGELOLAAN HUTAN MANGROVE DI KELURAHAN WONOREJO KECAMATAN RUNGKUT KOTA SURABAYA

Siska Yunindya Wardani

S1 Ilmu Administrasi Negara

PMP-KN

Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Surabaya

siskayunindyawardani@yahoo.com

Abstrak

Pengelolaan hutan mangrove yang dilakukan bertujuan untuk memberikan manfaat kepada semua pihak yang bersangkutan baik secara langsung maupun tidak langsung. Kegiatan partisipasi kelompok tani perlu dilaksanakan terus menerus untuk menggerakkan masyarakat agar mau ikut serta melakukan pengelolaan hutan mangrove yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana partisipasi kelompok tani mangrove dalam pengelolaan hutan mangrove di Kelurahan Wonorejo Kecamatan Rungkut Kota Surabaya. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Adapun subyek penelitian ini terdiri dari Ketua kelompok tani mangrove, anggota kelompok tani mangrove dan Staf Kehutanan Dinas Pertanian. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menggunakan analisis data interaktif yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi kelompok tani dalam pengelolaan hutan mangrove Wonorejo sudah cukup bagus dan optimal. Hal ini ditunjukkan melalui sebelas indikator keberhasilan partisipasi yaitu: 1) siapa penggagas partisipasi, yaitu ketua kelompok tani mangrove Wonorejo. 2) untuk kepentingan siapa partisipasi dilaksanakan, partisipasi dilaksanakan untuk kepentingan bersama. 3) siapa yang memegang kendali partisipasi, yaitu kelompok tani mangrove Wonorejo. 4) bagaimana hubungan pemerintah dengan masyarakat, hubungan pemerintah dengan masyarakat cukup harmonis karena adanya saling ketergantungan dan saling percaya. 5) kultural, yaitu budaya atau tradisi di kelompok tani untuk pengambilan keputusan adalah bermusyawarah. 6) politik, yaitu dari pihak pemerintah maupun kelompok tani menganut sistem transparan dan menghargai perbedaan tiap individunya. 7) legalitas, yaitu regulasi yang seharusnya ada namun kurang disosialisasikan. 8) ekonomi, dalam penerimaan anggota kelompok tani dilakukan secara terbuka dan anggota yang tergabung dapat memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung. 9) kepemimpinan, kepemimpinan yang disegani dan berkomitmen dalam kelompok tani sendiri. 10) waktu, penerapan partisipasi kelompok tani dalam pengelolaan hutan mangrove memerlukan waktu yang cukup lama karena pengelolaan berkelanjutan. Dan yang terakhir 11) jaringan yang menghubungkan antara masyarakat dan pemerintah, adanya forum pertemuan yang diadakan namun tidak memiliki jadwal yang tetap.

Kata Kunci: Partisipasi, Kelompok Tani, Hutan Mangrove.

Abstract

Management of mangrove forest that do aim to provide benefits to all parties concerned, either directly or indirectly. Farmer group participation activities should be carried out continuously to citizen the community to participate undertake sustainable management of mangrove forests. This study aims to describe how the participation of farmer group mangrove in the management of mangrove forest in the Village Wonorejo, Rungkut District the city of Surabaya. This type of research is descriptive qualitative. The subjects of this study consist of the farmer group leader mangrove, members of farmer groups and the Mangrove Forest Department of Agriculture. Data collection techniques used in the form of observation and documentation interviews using interactive data analysis, namey data collection, data reduction, data presentation and conclusion. The results of this study indicate that the participation of farmer groups in the management of mangrove forests Wonorejo is pretty good and optimal. This is demonstrated through the participation of eleven indicators of success, namely: 1) who is the originator of participation, namely mangrove Wonorejo farmer group leader. 2) for whom participation interests held, participation conducted for the common good. 3) who is in charge of participation, namely mangrove Wonorejo farmer groups. 4) how the government and public relations, government relations with fairly harmonious society because of the interdependence and mutual trust. 5) cultural, cultur or tradition in which farmer groups are consulted for decision making. 6) politics, from the government and farmer groups adopting a transparent and appreciate the diference of each individual. 7) the legality, namely that there should be regulation but less socialized. 8) economy, the acceptance of members of farmer groups conducted openly and members joined to benefit. 9) leadership that is respected and committed in its own farmer groups. 10) time, the application of the participation of farmer groups in mangrove forest management requires a long tme because of

ongoing management. And the last 11) network that connects between the public and the government, the existence of a forum held meetings but do not have a fixed schedule.

Keywords: Participation, Farmer Groups, Mangrove Forest

PENDAHULUAN

Hutan mangrove adalah ekosistem yang sangat unik dan merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat potensial untuk dikembangkan. Di kawasan hutan mangrove, terdapat unsur fisik, biologis daratan dan lautan, sehingga menciptakan sebuah ekosistem yang kompleks yang mencakup ekosistem laut dan ekosistem darat (Purnobasuki 2005:2).

Pada masa lampau, kawasan mangrove dianggap tidak memiliki manfaat, sehingga keberadaannya terabaikan. Penduduk sekitar kawasan tersebut hanya memanfaatkan hutan mangrove untuk diambil kayunya sebagai bahan bakar, serta menjaring beberapa fauna seperti ikan dan udang yang ada di sekitar kawasan mangrove, seperti yang dikatakan Gunarto dalam Harahab (2010:61):

“ekosistem hutan mangrove merupakan sumber daya yang dapat dipulihkan yang mempunyai manfaat ganda, yaitu manfaat bio-ekologis dan sosio-ekonomis. Manfaat bio-ekologis dari ekosistem hutan mangrove merupakan output yang berkaitan dengan fungsi lingkungan dan habitat berbagai jenis fauna. Sedangkan manfaat sosio-ekonomis ekosistem hutan mangrove merupakan output yang berkaitan langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat dalam pemanfaatannya”.

Sebagai salah satu kota pesisir, kota Surabaya memiliki beberapa kawasan hutan mangrove, yaitu di kawasan Kelurahan Gunung Anyar dan Wonorejo yang keduanya berada di dalam Kecamatan Rungkut. Kelurahan Wonorejo yang berbatasan langsung dengan Pantai Timur Surabaya memiliki kawasan hutan mangrove yang lebih besar dari Kelurahan Gunung Anyar.

Sampai dengan tahun 1998, kawasan hutan mangrove yang berada di wilayah Kelurahan Wonorejo terlihat tidak terawat. Banyak sampah di sekitar hutan, selain itu juga terjadi kerusakan karena adanya penebangan liar. Kurangnya kepedulian masyarakat dikarenakan minimnya kesadaran dan pengetahuan mereka tentang pentingnya hutan mangrove di kawasan pesisir. Hal ini dibuktikan bahwa sebanyak Sembilan ratus lima puluh orang penduduk adalah lulusan Sekolah Dasar. Sedangkan lulusan Sarjana hanya seratus tujuh puluh lima orang (Data Monografi Kelurahan Wonorejo Tahun 2013).

Walau demikian, lambat laun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hutan mangrove mulai terbentuk. Mereka mulai menyadari bahwa penebangan kayu yang dilakukan secara terus menerus akan berdampak pada rusaknya lingkungan dimana mereka tinggal. Oleh karena itu pada tahun 2004 masyarakat membentuk Kelompok Tani Mangrove atas gagasan dari Bapak Sony Mohson.

Beberapa warga ikut bergabung dalam kelompok tani tersebut dan melakukan upaya pelestarian dan pengelolaan hutan mangrove dengan beberapa kegiatan, yaitu pembersihan sampah yang mengganggu pertumbuhan tunas-tunas mangrove, pembibitan dan penanaman mangrove, dan memanfaatkan buah dari jenis mangrove *sonneratia alba*.

Pada tahun 2009, muncul kelompok tani baru yang juga ingin mengembangkan potensi alam hutan mangrove. Tetapi kelompok tani baru ini memiliki visi dan misi yang berbeda dari kelompok tani yang lama. Kelompok tani baru menjadikan hutan mangrove sebagai tempat ekowisata, sedangkan kelompok tani yang lama beranggapan bahwa hutan mangrove saat ini tidak cocok untuk dijadikan ekowisata sehingga memunculkan konflik. Oleh karena itu untuk mendorong keberhasilan kegiatan yang dilakukan kelompok tani mangrove, diperlukan adanya partisipasi dari masyarakat. Namun demikian, partisipasi masyarakat dalam pembangunan di zaman modern sekarang semakin sulit. Apalagi nilai-nilai kerjasama, gotong royong dan berbagai kearifan lokal dalam masyarakat semakin terkikis. Menurut Slamet dalam Anwas (2013:95) bahwa salah satu cara meningkatkan partisipasi dalam masyarakat adalah perlu ditumbuhkan berbagai lembaga-lembaga non formal yang ada di masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“Partisipasi Kelompok Tani dalam Pengelolaan Hutan Mangrove di Kelurahan Wonorejo Kecamatan Rungkut kota Surabaya”.**

1. Pengertian Partisipasi

Menurut Theodorson partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang di dalam kelompok sosial untuk mengambil bagian dari kegiatan masyarakatnya, di luar pekerjaan atau profesinya sendiri. (Mardikanto, 2012:81). Webster mengatakan hal tersebut sama dengan yang

dikemukakan oleh beberapa kamus bahasa sosiologi misalnya mengartikan partisipasi sebagai tindakan untuk “mengambil bagian” yaitu kegiatan atau pernyataan untuk mengambil bagian dari kegiatan dengan maksud memperoleh manfaat. (Mardikanto, 2012:81)

2. Macam dan bentuk Kegiatan Partisipasi

Yadav (Mardikanto, 2012:82-84), mengemukakan tentang adanya empat macam kegiatan yang menunjukkan partisipasi masyarakat di dalam kegiatan pembangunan, yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi, serta partisipasi dalam pemanfaatan hasil-hasil pembangunan.

3. Keberhasilan Partisipasi Masyarakat

1) siapa penggagas partisipasi, yaitu ketua kelompok tani mangrove Wonorejo. 2) untuk kepentingan siapa partisipasi dilaksanakan, partisipasi dilaksanakan untuk kepentingan bersama. 3) siapa yang memegang kendali partisipasi, yaitu kelompok tani mangrove Wonorejo. 4) bagaimana hubungan pemerintah dengan masyarakat, hubungan pemerintah dengan masyarakat cukup harmonis karena adanya saling ketergantungan dan saling percaya. 5) kultural, yaitu budaya atau tradisi di kelompok tani untuk pengambilan keputusan adalah bermusyawarah. 6) politik, yaitu dari pihak pemerintah maupun kelompok tani menganut sistem transparan dan menghargai perbedaan tiap individunya. 7) legalitas, yaitu regulasi yang seharusnya ada namun kurang disosialisasikan. 8) ekonomi, dalam penerimaan anggota kelompok tani dilakukan secara terbuka dan anggota yang tergabung dapat memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung. 9) kepemimpinan, kepemimpinan yang disegani dan berkomitmen dalam kelompok tani sendiri. 10) waktu, penerapan partisipasi kelompok tani dalam pengelolaan hutan mangrove memerlukan waktu yang cukup lama karena pengelolaan berkelanjutan. Dan yang terakhir 11) jaringan yang menghubungkan antara masyarakat dan pemerintah.

4. Pengertian Hutan Mangrove

Hutan mangrove sendiri jika ditinjau dari tata bahasa, terdiri atas dua kata yaitu “hutan” dan “mangrove”. Menurut Undang-undang No.14 Tahun 1999 dan Undang-undang No.19 Tahun 2004 yang mengatur tentang Kehutanan, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Sedangkan mangrove adalah:

“vegetasi hutan yang tumbuh pada tanah alluvial di daerah pantai dan sekitar muara sungai yang dipengaruhi oleh arus pasang surut air laut. Mangrove juga tumbuh pada pantai karang atau daratan terumbu karang yang berpasir tipis atau pada pantai berlumpur” (Purnobasuki, 2005:7)

5. Fungsi Hutan Mangrove

Secara lebih terperinci Purnobasuki (2005:19-27), menjabarkan fungsi bio-ekologis dan sosio-ekonomis dari hutan mangrove adalah sebagai berikut: 1) tempat pemijahan, 2) tempat berlindung fauna, 3) habitat alami yang membentuk keseimbangan ekologis, 4) penunjang kondisi lingkungan, 5) perlindungan pantai terhadap bahaya abrasi, 6) perangkap sedimen, 7) penyerap bahan pencemaran, 8) pencegah terjadinya keasaman tanah, 9) penahan angin laut, 10) penghambat intrusi air laut, 11) tempat wisata, 12) sumbu bahan obat-obatan.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu (Usman & Akbar, 2009:4). Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2008:06) adalah sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan.

Penelitian ini memilih lokasi di Hutan Mangrove Kelurahan Wonorejo Kecamatan Rungkut Kota Surabaya. Fokus dari penelitian ini yaitu partisipasi dari Kelompok Tani Mangrove dalam pengelolaan hutan mangrove berdasarkan sebelas aspek yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan partisipasi menurut Najib dalam Huraerah (2011:121-122) yaitu: 1) siapa penggagas partisipasi, 2) untuk siapa partisipasi dilaksanakan, 3) siapa yang memegang kendali partisipasi, 4) bagaimana hubungan pemerintah dengan masyarakat, 5) kultural, 6) politik, 7) legalitas, 8) ekonomi, 9) kepemimpinan, 10) waktu, 11) jaringan yang menghubungkan antara masyarakat dan pemerintah.

Sumber data Menurut Sugiyono (2012:224), yaitu data primer dan data sekunder. Adapun bentuk pokok pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1) observasi

Menurut Nawawi (2003:111), Observasi biasa diartikan sebagai pengamatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.

2) Wawancara

Wawancara yaitu, usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula.

3) Dokumentasi

Menurut Arikunto (2002:206), dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang

berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya, sehingga data yang diperoleh valid dan mempunyai acuan dalam penulisan skripsi ini.

Instrument penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah (Arikunto, 2010:203). Dalam penelitian Partisipasi Kelompok Tani Mangrove di Kelurahan Wonorejo Kecamatan Rungkut instrument penelitian yang digunakan adalah pedoman wawancara, kamera, perekam suara, dan lembar catatan data (data lapangan).

Teknik Analisis data dilakukan berdasarkan pada model yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012:247), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Deskripsi Lokasi

a. Profil Kelurahan Wonorejo Kecamatan Rungkut

Kelurahan Wonorejo termasuk dalam wilayah Kecamatan Rungkut yang terletak sekitar 3 Km dari pusat pemerintahan Kecamatan Rungkut dan 11 Km dari pusat pemerintahan Kota Surabaya. Kelurahan Wonorejo memiliki luas wilayah 650 Ha dan memiliki batas wilayah sebagai berikut:

| | |
|-----------------|------------------------------|
| Sebelah Utara | : Sungai Wonokromo |
| Sebelah Timur | : Selat Madura |
| Sebelah Selatan | : Kelurahan Medokan Ayu |
| Sebelah Barat | : Kelurahan Penjaringan Sari |

Keadaan geografis Kelurahan Wonorejo berada pada hamparan ketinggian tanah 2,5 meter dari permukaan laut. Secara geografis, topografi wilayah Kelurahan Wonorejo berupa daratan menengah dan memiliki suhu udara rata-rata 32°C.

b. Kelompok Tani Mangrove di Kelurahan Wonorejo

Kawasan hutan mangrove berada di Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Rungkut Kota Surabaya. Pada tahun 1998 hutan mangrove khususnya yang terletak di pesisir Pantai Timur Surabaya diselamatkan dari kepunahan karena banyak sekali tumpukan-tumpukan sampah yang menggantung disekitar kawasan hutan mangrove, selain itu karena adanya penebangan liar yang membuat hutan mangrove menjadi tidak asri lagi.

Awal mulanya ada salah satu warga Wonorejo yang sangat prihatin melihat keadaan hutan mangrove yang dekat dengan tempat tinggalnya terlihat sangat kumuh dan tidak terawat, warga tersebut bernama Bapak Sony Mohson. Melihat keadaan hutan mangrove seperti itu, beliauapun langsung turun tangan untuk membersihkan sampah-sampah yang ada disekitaran hutan mangrove tersebut.

Pembersihan kawasan hutan mangrove tersebut tidak memakan waktu yang singkat, beliau memulai kegiatan pembersihan sejak tahun 1998 hingga tahun 2001. Kegiatan pembersihan dilakukan disela-sela kesibukan, hanya pada hari libur seperti hari Minggu dan tanggal-tanggal merah saja, karena beliau juga bekerja sebagai salah satu karyawan swasta yang tidak memiliki banyak waktu luang. Sejalan dengan kegiatan pembersihan sampah tersebut, Bapak Sony juga sembari mengamati tiap jenis tanaman mangrove yang ada di pesisir sungai. Beliau juga mempelajari tiap jenis-jenis mangrove yang ditemuinya, tak jarang juga beliau menanyakan tentang tanaman tersebut kepada nelayan yang seringkali melintasi hutan mangrove. Selain itu beliau juga mencari tahu sendiri melalui referensi buku-buku yang dipinjam di perpustakaan kota dan juga dari internet.

Setelah dirasa cukup bersih dan memadai untuk dilakukan penanaman bibit mangrove yang baru, Bapak Sony beserta warga sekitar mulai melakukan penanaman bibit mangrove. Bibit mangrove tersebut awalnya dibeli dengan uang pribadi karena belum ada pihak-pihak lain yang turut serta bekerjasama dalam pengelolaan hutan mangrove tersebut. Setelah dilakukan kegiatan pembersihan dan penanaman yang dilakukan kurang lebih selama lima tahun tersebut, Bapak Sony berinisiatif untuk membentuk kelompok tani yang diketuai oleh beliau sendiri. Kelompok tani yang dibentuk pada tahun 2004 ini pada awalnya beranggotakan empat puluh orang namun pada tahun 2009 anggota kelompok tani tersisa dua puluh delapan orang. Hal tersebut dikarenakan adanya manajemen konflik antara kelompok tani dengan kelompok tani baru yang ingin mengelola hutan mangrove untuk dijadikan ekowisata.

Banyak kegiatan yang dilakukan oleh kelompok tani. Salah satunya yaitu mereka sering mengadakan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat. Pelatihan yang diadakan tidak hanya di lingkup Kelurahan Wonorejo saja, tetapi juga di luar kota bahkan sampai luar pulau. Tetapi khususnya mereka mengajak masyarakat sekitar untuk belajar mengelola hasil dari hutan mangrove seperti pengolahan buah bogem yaitu buah dari tanaman mangrove jenis *Sonneratia Alba* yang dapat diolah menjadi beberapa jenis olahan makanan dan minuman. Seperti sirup bogem, dodol mangrove, tiwul mangrove, dawet mangrove, tepung mangrove dan lain sebagainya yang sudah dapat izin dari Depkes dan Disperindag. Selain itu, kelompok tani juga memproduksi hasil laut seperti ikan, udang, dan kepiting atau rajungan yang di

olah menjadi kerupuk ikan, kerupuk udang, kerupuk rajungan, bakso ikan, bakso udang, dan bandeng cabut duri.

Setelah cukup lama berlangsung kegiatan kelompok tani ini, lambat laun kelompok tani memiliki jaringan kerjasama dengan pihak swasta antara lain dengan PT. Sampoerna, PT. Pertamina, Bank Jatim, Coca Cola, LP3I, dan masih banyak lagi. Kelompok tani mangrove juga tidak hanya bekerjasama dengan pihak swasta saja, dalam pengelolaannya kelompok tani juga di dampingi oleh Dinas yang terkait dengan bagian ini yaitu Dinas Pertanian. Awalnya, Bapak Sony dibantu oleh Dinas Pertanian mengadakan pelatihan-pelatihan secara khusus terkait tentang teknis bagaimana cara penanaman mangrove yang baik dan benar. Keduanya juga saling bertukar informasi untuk menambah pengetahuan tentang yang dipelajari tersebut. Tak jarang juga kelompok tani mangrove diundang oleh Dinas Pertanian untuk menjadi narasumber dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat di daerah lain tentang pembibitan mangrove.

Terbentuknya kelompok tani mangrove ini tidak semata hanya sebuah perkumpulan masyarakat biasa, kelompok tani juga membentuk susunan organisasi, visi dan misi serta beberapa divisi di dalamnya. Adapun visi yang telah ditetapkan, yaitu: 1) Memberikan edukasi tentang lingkungan yang bertujuan untuk pelestarian lingkungan, sehingga diharapkan masyarakat setempat maupun wisatawan yang telah mendapatkan pembelajaran tentang pelestarian mangrove ikut menjaga dan melestarikan hutan mangrove. 2) Menciptakan daerah pesisir menjadi daerah yang sejahtera untuk masyarakat, dengan dibentuknya kelompok tani sekaligus membuka lapangan pekerjaan sampingan bagi masyarakat setempat, sehingga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. 3) Mengubah perilaku masyarakat pesisir dari memanfaatkan kayu menjadi memanfaatkan buah dan melestarikan mangrove, masyarakat setempat dididik dan dilatih untuk membudidayakan hasil dari hutan mangrove, seperti pembibitan mangrove, membuat sirup, dodol, dawet dari buah mangrove, dan lain sebagainya.

Sedangkan misi dari kelompok tani mangrove, yaitu: 1) Membuat kehidupan masyarakat pesisir menjadi lebih sejahtera karena adanya pengelolaan hutan mangrove yang semakin baik, masyarakat diajak turut serta berpartisipasi mengelola hutan mangrove karena juga untuk memperbaiki kesejahteraan hidup mereka. 2) Memberi pelatihan-pelatihan kepada masyarakat agar bisa memanfaatkan potensi-potensi yang ada di lingkungannya, seperti memberi pembekalan tentang pemanfaatan hasil dari hutan mangrove yang telah mereka kelola sehingga menjadi sebuah barang yang bernilai harganya. 3) Mengenalkan sejak usia dini tentang area hutan mangrove, masyarakat diajak untuk lebih dekat dengan hutan mangrove, untuk mengenali dan mengelola hutan mangrove yang sebenarnya memiliki potensi yang besar jika dikelola dengan baik dan benar.

Kelompok tani mangrove di Wonorejo ini juga memiliki beberapa divisi yang mana berfungsi sebagai wakil untuk mengurus berbagai macam kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok tani, antara lain yaitu: Divisi Edukasi Pelatihan dan Pengembangan, Divisi Konservasi dan Pembibitan, dan Divisi UKM (Pengelolaan Hasil Hutan Mangrove)

Secara garis besar tujuan dibentuknya kelompok tani mangrove ini adalah untuk mengelola hutan mangrove dan menjaga dari kerusakan alami maupun buatan. Selain itu hutan mangrove yang sudah dikelola dengan baik tetap diperhatikan kelestarian lingkungan beserta flora dan fauna yang terdapat di sekitar area hutan mangrove. Tanaman mangrove ini mempunyai dua belas jenis, namun di kawasan hutan mangrove Wonorejo hanya ada tujuh jenis yang dikembangkan yang berfungsi sebagai penyangga air laut.

c. Pengelolaan Hutan Mangrove di Kelurahan Wonorejo

Pengelolaan hutan mangrove di Kelurahan Wonorejo ini dikelola oleh kelompok tani mangrove yang merupakan masyarakat sekitar. Pengelolaannya diserahkan kepada kelompok tani mangrove Wonorejo. pengelolaan yang dilakukan oleh kelompok tani ini mulai operasional di lapangan, manajemen pengelolaan, hingga pengawasan keamanan. Operasional di lapangan meliputi kegiatan pembersihan, penanaman, pembibitan, pelatihan dan sosialisasi. Untuk manajemen pengelolaan, meliputi pembuatan olahan hasil dari mangrove yang ditujukan bagi warga sekitar yang mau berpartisipasi melakukan pelatihan. Untuk pengawasan keamanan, kelompok tani tiap tiga bulan sekali melakukan perawatan dan pemantauan tentang perkembangan mangrove yang telah ditanam. Selain itu kelompok tani juga melakukan pengawasan untuk mencegah terjadinya kerusakan mangrove baik dari faktor internal maupun eksternal.

Pengelolaan hutan mangrove yang dilakukan oleh warga sekitar adalah salah satu bentuk dari kepedulian warga terhadap kelangsungan kelestarian hutan mangrove yang ada di daerah sekitar tempat tinggalnya. Warga yang mau ikut berpartisipasi tidak dipungut biaya sepeserpun, yang terpenting adalah keikhlasan dan kesukarelaan mereka dalam berpartisipasi mengelola hutan mangrove.

Pada awal tahun 2000 pohon-pohon mangrove atau oleh warga sekitar lebih dikenal dengan pohon bakau yang berada di tepian pantai atau di area pertambakan sering ditebangi pohonnya dan dijadikan sebagai kayu bakar atau dijual. Untuk menghentikan kebiasaan penebangan pohon tersebut, kelompok tani memasang papan himbauan supaya tidak menebang pohon tetapi sebaliknya yaitu menanam pohon. Papan himbauan tersebut ditujukan kepada seluruh warga yang biasanya melakukan penebangan pohon dan juga ditujukan kepada nelayan atau pengemudi perahu besar agar saat perjalanan melalui hutan mangrove dikondisikan pelan-pelan yang

berfungsi agar bibir sungai tidak longsor akibat hantaman ombak.

Pihak Dinas Pertanian pun turut serta membantu memfasilitasi kelompok tani dengan memberikan sarana prasarana seperti, mengajari kelompok tani secara teknis bagaimana tata cara yang baik dan benar dalam melakukan penanaman, memberikan bantuan mesin-mesin yang mana mesin tersebut berguna untuk menjalankan tugas kelompok tani sebagai pengelola hutan mangrove.

Pada awal tahun 2004, ketua kelompok tani mangrove membuat ide untuk memanfaatkan buah mangrove, setelah melalui beberapa kali percobaan akhirnya ditemukan komposisi yang pas untuk dijadikan sebagai sirup mangrove. Karena bahan utama yang digunakan untuk membuat sirup adalah air atau sari dari buah tersebut maka ampasnya tidak dipergunakan. Namun, karena memang beliau tidak mau membuang kesempatan yang ada, ampas dari sari buah mangrove pun diolahnya hingga bisa menjadi dodol mangrove. begitu juga dengan dodol mangrove ini dilalui dengan beberapa kali percobaan hingga mendapatkan rasa dan tekstur yang diinginkan.

Setelah merasa percobaannya berhasil dan karena Bapak Sony juga tidak mau menyimpan ilmunya sendiri maka, di tahun 2005 beliau mengadakan pelatihan-pelatihan awalnya bagi kelompok tani dan masyarakat sekitar Wonorejo untuk mengolah buah mangrove yang bisa dijadikan sebagai sirup dan dodol. Selain itu, kelompok tani juga mengajak kerjasama Dinas Pertanian untuk diadakan sosialisasi tentang pengolahan buah mangrove. dan ternyata mendapat sambutan baik dari Dinas Pertanian, kelompok tani dijadikan sebagai narasumber dan juga mendapat bantuan sarana prasarana dari Dinas dalam melakukan sosialisasinya.

Di tahun yang sama yaitu pada tahun 2005, kelompok tani yang sudah banyak melakukan sosialisasi khususnya di Wilayah Surabaya, mendapat mandat dari Pemerintah untuk melaksanakan program GERHAN (Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan). Pemerintah memberikan bibit sebanyak ± 360.000 untuk ditanam pada lahan 200ha yang terdiri dari 100ha di Pantai Timur Surabaya dan 100ha di pesisir sungai Keputih. Di tahun 2007, setelah kelompok tani sering melakukan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan khususnya di Wilayah Surabaya. Kelompok tani juga mulai melakukan pameran-pameran produk dari olahan buah mangrove di tiap acara yang khususnya bertemakan lingkungan. Masih di tahun yang sama, kelompok tani juga memamerkan produk sirupnya pada acara pameran Hari Pangan Sedunia di Mojosari, Mojokerto dengan harga sirup sebesar Rp. 20.000,- per liternya, dipamerkan juga dalam rangka Peringatan Hari Ibu di Taman Surya. Lalu di tahun 2008 juga mengikuti pameran produk olahan mangrove di Lebo Sidoarjo dalam rangka Hari Krida Tani Indonesia.

2. Partisipasi Kelompok Tani Dalam Pengelolaan Hutan Mangrove di Kelurahan Wonorejo

a. Siapa penggagas partisipasi

Yaitu siapakah yang memunculkan adanya partisipasi kelompok tani, apakah dari pemerintah pusat, daerah, atau LSM. Dalam kegiatan berpartisipasi, masyarakat pasti membutuhkan wadah untuk menyalurkan pendapatnya atau untuk sekedar saling bertukar informasi dalam melakukan kegiatannya. Maka dari itu dibentuklah kelompok tani yang diharapkan bisa menjadi tempat berkumpulnya masyarakat yang mau ikut serta berpartisipasi. Masyarakat yang ikut serta dalam kegiatan partisipasi kelompok tani pasti mengetahui siapa penggagas awal terbentuknya kelompok tani ini.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa penggagas utama partisipasi masyarakat adalah Bapak Sony yang tidak lain juga merupakan ketua dari kelompok tani. Awalnya beliau melakukan kegiatan pembersihan tersebut seorang diri, lalu karena dirasa kurang efektif maka beliau mengajak warga lain untuk ikut serta membantu kegiatan bersih-bersih tersebut. Lambat laun karena dirasa keikutsertaan warga meningkat maka beliau membentuk sebuah organisasi yaitu kelompok tani mangrove Wonorejo.

b. Untuk kepentingan siapa partisipasi dilaksanakan

Dalam hal ini peneliti mencari tahu adanya partisipasi kelompok tani dalam pengelolaan hutan mangrove tersebut dilaksanakan untuk kepentingan pemerintah atau untuk kepentingan masyarakat luas. Kegiatan partisipasi dalam kelompok tani dilakukan tidak semata hanya untuk wadah dalam memberikan pendapat atau saling bertukar informasi antar anggota kelompok. Partisipasi warga dalam kelompok tani untuk mengelola hutan mangrove salah satunya juga untuk kepentingan masyarakat, yaitu kesejahteraan warga sekitar yang daerah tempat tinggalnya dekat dengan kawasan pengelolaan. Partisipasi dari warga juga diharapkan bisa menjadi jalan dalam mewujudkan tujuan pemerintah untuk melindungi Kota Surabaya dari ancaman bencana laut.

Dari hasil wawancara, dapat dijelaskan bahwa kegiatan partisipasi dilaksanakan bukan hanya untuk kepentingan masyarakat, tetapi juga untuk kepentingan Pemerintah dalam mewujudkan tujuannya. Jadi intinya kegiatan ini dilaksanakan untuk kepentingan bersama.

c. Siapa yang memegang kendali partisipasi

Yaitu apakah partisipasi kelompok tani dalam pengelolaan hutan mangrove ada yang memegang kendali seperti pemerintah ataupun LSM dan bagaimana peran pemegang kendali tersebut dalam menangani permasalahan, kondisi, maupun kebutuhan daerah atau masyarakatnya, karena hal tersebut akan mempengaruhi keberhasilan kegiatan pengelolaan hutan mangrove.

Dalam mewujudkan partisipasi masyarakat dengan menggabungkan berbagai individu yang berbeda-beda dan dengan banyak faktor yang mempengaruhi, pasti memiliki banyak kendala dalam pelaksanaan kegiatannya. Untuk mengatasi kendala-kendala yang muncul dalam kegiatan tersebut, kelompok tani lebih sering mengadakan musyawarah secara intern tanpa melibatkan pemerintah setempat. Karena mereka menilai bahwa pemerintah setempat seringkali menggunakan politik belah bambu

Dari hasil wawancara dapat dijelaskan bahwa, jika dalam pelaksanaan kegiatan partisipasi masyarakat tersebut mengalami kendala-kendala atau ada faktor-faktor penghambat dalam kegiatannya yang sering memegang kendali dalam masalah tersebut adalah kelompok tani sendiri karena mereka lebih mengetahui apa yang terjadi disekitar mereka dan lebih memahami kondisi lingkungan disekitar kawasan hutan mangrove tersebut.

d. Hubungan pemerintah dengan masyarakat

Yaitu jika adanya hubungan pemerintah yang baik dengan masyarakat maka akan lebih mudah partisipasi untuk dilaksanakan. Oleh sebab itu kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah diperlukan untuk menjalin hubungan baik antara pemerintah dengan masyarakat.

Dalam mengelola kelompok tani, tidak hanya kelompok tani yang terlibat dalam pengelolaannya. Kelompok tani juga di bantu oleh pemerintah khususnya dari Dinas Pertanian. Dalam bekerjasama, kedua pihak tersebut juga harus memiliki hubungan yang baik agar kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan juga dapat berjalan dengan lancar.

Dari penjelasan wawancara, hubungan kelompok tani dengan pemerintah terlihat cukup harmonis. Dari saling adanya ketergantungan antara kelompok tani dengan masyarakat, hal itu yang membuat intensitas pertemuan mereka cukup bagus. Karena hal itu juga partisipasi akan lebih mudah dilaksanakan. Selain adanya intensitas pertemuan antara kedua pihak tersebut, mereka juga harus memiliki rasa saling percaya. Dalam rasa saling percaya yang ada di kedua pihak tersebut, juga harus ada rasa percaya bahwa masyarakat tetap bisa diandalkan untuk melakukan pembangunan khususnya pengelolaan hutan mangrove ini.

Dapat dijelaskan dari hasil wawancara, bahwa kepercayaan yang diberikan dari masing-masing pihak sangat penting untuk keberlanjutan hubungan antara kelompok tani dengan pemerintah, dan keberlanjutan partisipasi kelompok tani dalam pengelolaan hutan mangrove Wonorejo. Selain itu juga penting mengandalkan masyarakat untuk membantu pengelolaan pembangunan dan untuk terwujudnya tujuan-tujuan dari semua pihak yang terkait.

e. Kultural

Yaitu merupakan budaya yang ada di masyarakat dengan tradisi berpartisipasi dalam kegiatan apapun, itu akan memudahkan proses pengambilan keputusan dengan bermusyawarah.

Kelompok tani merupakan sebuah organisasi atau wadah bagi masyarakat dan anggotanya untuk saling bertukar pendapat, memberi usulan bahkan membuat suatu keputusan. Dalam pelaksanaannya, ketua kelompok tani tidak bersikap otoriter untuk mengambil sebuah keputusan. Beliau mengajak semua anggota kelompok berunding dan bermusyawarah dalam menyelesaikan sebuah masalah atau menentukan suatu keputusan.

Jadi dapat dijelaskan bahwa tradisi masyarakat Wonorejo khususnya dalam kelompok tani untuk berpartisipasi dan melakukan pengambilan keputusan yaitu melalui jalan bermusyawarah. Karena melalui jalan bermusyawarah dirasa cukup efektif mengingat jumlah kelompok tani juga tidak terlalu banyak. Selain itu dengan diadakannya perkumpulan rapat tersebut bisa untuk mempererat tali silaturahmi antar anggota kelompok tani.

f. Politik

Politik akan mempengaruhi partisipasi dari masyarakat. Dengan adanya sistem pemerintahan yang demokratis, transparan, dan stabil masyarakat tentu akan lebih mudah untuk menyampaikan aspirasinya. Aspirasi dalam pemerintahan dibutuhkan agar masyarakat dapat mengawasi kinerja pemerintah, sedangkan pemerintahan yang stabil akan memberikan keamanan kepada masyarakat serta akan membuat masyarakat memahami akan konsistensi dari pemerintahan itu.

Dalam kelompok tani, selain adanya partisipasi dari masyarakat juga ada dukungan dari pemerintah yaitu Dinas Pertanian dan dari pihak swasta. Agar ketiga pihak tersebut bisa tetap berjalan bersama, dalam mengatur hubungannya harus ada saling kepercayaan dan keterbukaan atau transparansi. Selain itu untuk memutuskan suatu pendapat baik dari pihak pemerintah maupun dari kelompok tani dan swasta sebaiknya harus dilakukan dengan cara bermusyawarah dan demokratis. Karena organisasi ini terlibat banyak individu yang mana tiap-tiap dari mereka memiliki perbedaan yang signifikan, jadi pemerintah maupun ketua dari organisasi tidak boleh membedakan dan harus menghargai keberagaman tersebut.

Salah satu keterlibatan pihak pemerintah dan swasta yaitu masalah anggaran dana yang disalurkan untuk kelompok tani ataupun langsung ke masyarakat. Untuk mengetahui bagaimana aliran dana tersebut mengalir sesuai dengan aturannya harus menggunakan sistem yang transparan.

Dari hasil wawancara dapat dijelaskan bahwa, dari pihak pemerintah maupun kelompok tani tetap menganut sistem yang transparan. Mereka juga menghargai perbedaan-perbedaan yang ada tiap-tiap individu dalam kelompok-kelompok tersebut, mereka

tidak membeda-bedakan yang satu dengan yang lainnya. Selain itu pengambilan keputusannya juga dilakukan dengan cara demokratis.

g. Legalitas

Yaitu peraturan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan untuk menjamin warga berpartisipasi dalam pengelolaan hutan mangrove serta terintegrasi dalam pemerintahan di daerah tersebut.

Dalam sebuah organisasi, banyak sekali komponen yang diperlukan untuk membantu terwujudnya tujuan-tujuan dari organisasi tersebut. Termasuk kelompok tani mangrove Wonorejo ini, selain mendapat dukungan moral dan materil dari pemerintah maupun warga seharusnya juga diupayakan tersedianya regulasi dari pemerintahan daerah yang menjamin partisipasi warga dalam pengelolaan hutan mangrove ini.

Dari wawancara diatas dijelaskan bahwa seharusnya memang regulasi itu ada dan yang mengatur adalah dari pemerintah wilayah setempat. Namun karena kurangnya sosialisasi ke masyarakat atau terbentur dengan SDM dari masing-masing pihak sehingga regulasi tersebut tidak sampai ke masyarakat yang memang membutuhkan hal tersebut untuk dijadikan pedoman dalam menjalankan pengelolaan pembangunan khususnya pengelolaan hutan mangrove Wonorejo.

Legalitas diperlukan sebagai pedoman para pelaksana teknis untuk menjalankan kegiatannya. Dalam hal ini regulasi yang digunakan oleh kelompok tani mangrove yaitu Peraturan Daerah Surabaya Nomor 3 tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya. Dalam perda tersebut Kecamatan Rungkut masuk ke dalam zona empat wilayah laut di sebelah timur laut dengan fungsi utama sebagai konservasi, rehabilitasi lingkungan laut dan pantai serta areal penangkapan dan budidaya perikanan. Unit pengembang satu Rungkut juga digunakan sebagai kawasan lindung berupa sempadan pantai, sungai, boozem atau waduk serta kawasan lindung mangrove. Dengan adanya regulasi tersebut, pelaksanaan kegiatan pasrtisipasi kelompok tani dalam mengelola hutan mangrove memiliki peraturan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga jelas legalitasnya.

h. Ekonomi

Ekonomi diperlukan untuk pembiayaan atau penyediaan akses bagi masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam pengelolaan hutan mangrove sehingga masyarakat yang telah ikut berpartisipasi bisa dipastikan mendapat manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam membentuk organisasi yang berbasis kepada masyarakat, seharusnya dalam perekrutan anggota tidak membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Diharapkan semua golongan masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk ikut berpartisipasi. Seperti dalam kegiatan kelompok tani mangrove ini, semua golongan masyarakat boleh ikut serta untuk berpartisipasi mengelola hutan mangrove. Selain memperbolehkan semua warga untuk ikut bergabung dalam kegiatan berpartisipasi ini, sebaiknya

juga harus memastikan bahwa setiap orang dapat memperoleh manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung setelah mereka ikut serta berpartisipasi.

Dari hasil wawancara dapat dijelaskan bahwa, dalam penerimaan warga yang mau ikut bergabung dengan kelompok tani dilakukan secara terbuka tanpa membedakan antara yang satu dengan yang lain. Semua memiliki kesempatan yang sama, namun memang karena tujuan dari pembentukan kelompok tani ini salah satunya yaitu untuk mensejahterakan warga maka tetap yang didahulukan yaitu warga Wonorejo.

Warga yang telah ikut berpartisipasi dalam pengelolaan hutan mangrove diharapkan dapat memperoleh manfaat dari kegiatan tersebut. Dan sesuai dengan hasil wawancara memang banyak manfaat yang didapat oleh warga salah satunya yang terlihat yaitu peningkatan ekonomi mereka yang bertambah karena pengelolaan hasil hutan mangrove tersebut. Manfaat yang tidak terlihat secara langsung adalah keasrian lingkungan karena telah ditanami bibit-bibit baru untuk menumbuhkan kembali hutan mangrove yang dulunya rusak.

i. Kepemimpinan

Kepemimpinan yang disegani oleh masyarakat serta kepemimpinan yang memiliki komitmen untuk mendorong adanya partisipasi akan dapat membantu masyarakat ikut serta dalam pengelolaan hutan mangrove. kepemimpinan tersebut bisa dari kalangan pemerintah, LSM, masyarakat itu sendiri atau tokoh masyarakat.

Kepemimpinan dalam sebuah organisasi memang penting. Disamping untuk mengatur jalannya kegiatan yang telah direncanakan, juga digunakan untuk mendorong pelaksanaan kegiatan berpartisipasi untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan kepemimpinan yang disegani dan memiliki komitmen. Tapi dalam kelompok tani mangrove siapa tokoh atau aktor penting yang mendorong wujudnya partisipasi tersebut. Selain sikap kepemimpinan, yang dibutuhkan juga tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan partisipasi masyarakat.

Dari hasil wawancara dapat dijelaskan bahwa, aktor atau tokoh penting yang memiliki komitmen kepemimpinan dalam mewujudkan partisipasi masyarakat yaitu umumnya dari pihak pemerintah, pihak swasta, dan dari kelompok tani sendiri. Tapi khususnya yaitu dari ketua kelompok tani sendiri, karena ketua kelompok tani lebih tau hal-hal apa saja yang terjadi di lingkungan sekitarnya terkait mengenai pengelolaan hutan mangrove yang memang terletak di dekat kawasan tempat tinggal anggota kelompok tani. Kegiatan-kegiatan yang mendorong terwujudnya partisipasi kelompok tani juga diarahkan oleh ketua kelompok tani. Beliau sering mengadakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat untuk menambah kualitas SDM dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya.

j. Waktu

Untuk mewujudkan keberhasilan partisipasi dalam pengelolaan hutan mangrove diperlukan kurun waktu yang cukup lama dan terus menerus artinya tidak hanya sesaat.

Dalam sebuah pengelolaan pembangunan tidak memerlukan waktu yang sedikit dalam penerapan maupun tindak lanjutnya. Seperti dalam pengelolaan hutan mangrove ini, disini menganut sistem pengelolaan berkelanjutan karena terkait dengan penanaman pohon yang setelah ditanam tidak dibiarkan begitu saja. Melainkan setelah proses penanaman ada tahap pengawasan berlanjut, ada proses evaluasi, dan juga reproduksi dari hasil penanaman tersebut.

Dari hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa penerapan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove Wonorejo itu tidak hanya sesaat atau pengelolaan yang *sustainable*. Pengelolaan hutan mangrove ini memerlukan kurun waktu yang cukup lama karena mengingat bahwa yang dikelola ini merupakan tanaman yang memiliki fungsi salah satunya untuk mencegah terjadinya ancaman bencana dari laut. Jadi harus melalui proses-proses atau tahapan-tahapan agar bisa mencapai tujuan yang diinginkan.

k. Tersedianya jaringan yang menghubungkan antara warga masyarakat dan pemerintah

Yaitu adanya forum pertemuan yang menjadi jaringan penghubung antara kelompok tani dan pemerintah sehingga terjalin komunikasi yang baik.

Untuk meningkatkan kegiatan dan mewujudkan tujuan-tujuan dari organisasi, sebaiknya tersedia jaringan yang menghubungkan antara pihak satu dengan yang lainnya. Seperti pada kelompok tani sebaiknya menciptakan jaringan yang menghubungkan antara pihak kelompok tani dengan pemerintah atau dengan pihak swasta, bisa dengan cara melakukan pertemuan-pertemuan atau mengadakan forum yang dihadiri oleh orang-orang yang memiliki kepentingan dan tujuan bersama.

Dari hasil wawancara dapat dijelaskan bahwa, sudah ada forum-forum pertemuan yang diadakan antara pihak pemerintah, swasta dan kelompok tani. Namun forum pertemuan tersebut tidak memiliki jadwal yang tetap. Jadi pertemuan yang mereka buat tergantung kebutuhan dari masing-masing pihak. Karena semua pihak memang saling berhubungan dan saling bergantung.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dan dianalisis yang telah dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa, penggagas utama partisipasi adalah Bapak Sony yg juga merupakan ketua dari kelompok tani mangrove Wonorejo. Awalnya beliau melakukan kegiatan pembersihan pesisir seorang diri, namun karena dirasa kurang efektif maka beliau mengajak warga lain untuk ikut membantu. Lambat laun karena dirasa keikutsertaan

warga meningkat, akhirnya dibentuklah kelompok tani mangrove Wonorejo. Kegiatan partisipasi kelompok tani dilaksanakan bukan hanya untuk kepentingan masyarakat, tetapi juga untuk kepentingan pemerintah dalam mewujudkan tujuannya. Jadi intinya kegiatan ini dilaksanakan untuk kepentingan bersama.

Jika dalam pelaksanaan kegiatan partisipasi kelompok tani tersebut mengalami kendala-kendala atau ada penghambat dalam kegiatannya, yang sering memegang kendali dalam masalah tersebut adalah kelompok tani sendiri karena mereka lebih mengetahui apa yang terjadi disekitar mereka dan lebih memahami kondisi lingkungan disekitar kawasan hutan mangrove. Hubungan kelompok tani dengan pemerintah terlihat cukup harmonis. Karena adanya saling ketergantungan antara keduanya yg membuat intensitas pertemuan mereka cukup bagus. Selain adanya intensitas pertemuan antara keduanya, mereka juga harus memiliki rasa saling percaya, karena hal tersebut sangat penting untuk keberlanjutan hubungan dan kegiatan partisipasi yang dijalankan.

Tradisi masyarakat Wonorejo khususnya dalam kelompok tani untuk berpartisipasi dan melakukan pengambilan keputusan yaitu melalui jalan bermusyawarah. Karena dengan bermusyawarah dirasa cukup efektif mengingat jumlah anggota kelompok tani juga tidak terlalu banyak. Dari pihak pemerintah maupun kelompok tani tetap menganut sistem yang transparan. Mereka juga menghargai perbedaan yang ada pada tiap individu dalam kelompok tersebut. Selain itu pengambilan keputusannya juga dilakukan secara demokratis.

Seharusnya memang regulasi itu ada dan yang mengatur adalah dari pemerintah wilayah setempat. Namun karena kurangnya sosialisasi ke masyarakat atau terbentur dengan SDM dari masing-masing pihak sehingga regulasi tersebut tidak sampai ke masyarakat khususnya kelompok tani yang memang membutuhkan hal tersebut untuk dijadikan pedoman dalam menjalankan kegiatan pengelolaan pembangunan khususnya pengelolaan hutan mangrove. Dalam penerimaan warga yang mau ikut bergabung dengan kelompok tani dilakukan secara terbuka dan untuk siapa saja. Semua memiliki kesempatan yang sama namun memang karena tujuan dari pembentukan kelompok tani ini salah satunya untuk mensejahterakan warga, maka yang didahulukan yaitu warga Wonorejo. Warga yang telah ikut berpartisipasi dalam pengelolaan hutan mangrove diharapkan dapat memperoleh manfaatnya, salah satunya yang terlihat yaitu peningkatan ekonomi mereka dari pengelolaan hasil hutan mangrove. selain itu manfaat yang tidak terlihat secara langsung yaitu keasrian lingkungan karena telah ditanami bibit-bibit baru untuk melestarikan kembali hutan mangrove.

Tokoh penting yang memiliki komitmen kepemimpinan dalam mewujudkan partisipasi masyarakat yaitu umumnya dari pihak pemerintah, pihak swasta, dan kelompok tani. Tapi khususnya yaitu dari ketua kelompok tani sendiri, karena ketua kelompok tani lebih tau hal-hal apa saja yang terjadi di lingkungan sekitarnya terkait mengenai pengelolaan hutan mangrove yang memang

terletak di dekat kawasan tempat tinggal anggota kelompok tani.

Penerapan kegiatan partisipasi kelompok tani dalam pengelolaan hutan mangrove Wonorejo tidak hanya sesaat tetapi berkelanjutan. Pengelolaan ini memerlukan waktu yang cukup lama karena mengingat bahwa yang dikelola ini merupakan tanaman yang memiliki fungsi salah satunya untuk mencegah terjadinya ancaman bencana dari laut. Jadi harus melalui proses dan tahapan-tahapan agar bisa mencapai tujuan yang diinginkan.

Selain itu juga sudah ada forum-forum pertemuan yang diadakan antara pihak pemerintah, pihak swasta dan kelompok tani. Namun forum pertemuan tersebut tidak memiliki jadwal yang tetap, jadi pertemuan yang mereka buat tergantung kebutuhan dari masing-masing pihak. Karena semua pihak memang saling berhubungan dan saling ketergantungan.

Saran

Dari hasil pemaparan diatas, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah:

1. Diharapkan seluruh pemerintah khususnya pemerintah setempat yaitu Kelurahan dan Kecamatan juga harus berperan aktif dalam pengelolaan untuk perkembangan hutan mangrove Wonorejo khususnya bagi Kota Surabaya itu sendiri.
2. Diharapkan pemerintah melakukan sosialisasi secara jelas dan maksimal sehingga kelompok tani paham akan regulasi yang mendampingi kegiatan partisipasi mereka.
3. Diharapkan pemerintah tidak hanya mementingkan kepentingan dari salah satu pihak, tetapi juga kepentingan untuk semua pihak.
4. Diharapkan masyarakat setelah memperoleh pelatihan dan pengalaman tentang pengelolaan hasil hutan mangrove yang sudah diberikan, dapat memanfaatkannya dengan baik dan benar serta lebih aktif, kreatif dan inovatif dalam mengembangkan pengelolaan hasil hutan mangrove.
5. Diharapkan masyarakat setempat maupun wisatawan lebih ikut menjaga dan melestarikan hutan mangrove agar Kota Surabaya khususnya Kelurahan Wonorejo terhindar dari banjir dan abrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwas, Oos M. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Harahab, Nuddin. 2010. *Penelitian Ekonomi Ekosistem Hutan Mangrove & Aplikasinya dalam Perencanaan Wilayah Pesisir*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Huraerah, Abu. 2011. *Pengorganisasian & Pengembangan Masyarakat*. Bandung: Humaniora.

Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebiato. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Moleong, Lexy J. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Nawawi, Hadari. 2003. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Peraturan Daerah No 3 Tahun 2007 (online), (<http://jdih.jatimprov.go.id> diakses pada tanggal 20 April 2014).

Purnobasuki, Hery.2005. *Tinjauan Perspektif Hutan Mangrove*. Surabaya: Airlangga University Press.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Tuwo, Ambo. 2011. *Pengelolaan Ekowisata Pesisir dan Laut: Pendekatan Ekologi, Sosial-Ekonomi, Kelembagaan, dan Sarana Wilayah*. Surabaya: Brillian Internasional.

Usman, Husaini & Akbar, Purnomo Setiadi. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.